

## Dinamika Kemiskinan Pedesaan di Kalimantan Barat: Analisis Data Panel

Supriaman

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura Pontianak, Indonesia

\*) Korespondensi (e-mail: [supriaman@ekonomi.untan.ac.id](mailto:supriaman@ekonomi.untan.ac.id))

### Abstract

Rural poverty remains an urgent challenge in many parts of Indonesia, including West Kalimantan. Despite ongoing poverty reduction efforts, a persistent gap remains between urban and rural areas. This study examines the dynamics of rural poverty in West Kalimantan using panel data analysis. By analyzing longitudinal data over time, we assess the factors associated with rural poverty and identify key trends and patterns. The panel-data approach accounts for both individual and time effects, allowing a more comprehensive understanding of poverty dynamics in the region. The results indicate that, in partial estimations, education level and GDP are negatively associated with poverty. The findings also show that education, open unemployment, and GDP jointly have a statistically significant effect on rural poverty rates. These results suggest that improving education quality, expanding employment opportunities, and strengthening household economic well-being are strategic priorities for reducing rural poverty.

Keywords: Education Level, Open Unemployment, GDP, Rural Poverty, Panel Data Analysis.

### Abstrak

Kemiskinan di pedesaan masih menjadi masalah mendesak di banyak wilayah di Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Meskipun ada upaya untuk mengentaskan kemiskinan, kesenjangan masih terjadi antara daerah perkotaan dan pedesaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika kemiskinan pedesaan di Kalimantan Barat dengan menggunakan analisis data panel. Dengan memeriksa data longitudinal dari waktu ke waktu, kami menilai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kemiskinan di pedesaan dan mengidentifikasi tren dan polanya. Analisis kami menggunakan teknik data panel untuk memperhitungkan dampak individu dan waktu, sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika kemiskinan di wilayah tersebut. Temuan dari penelitian ini menjelaskan bahwa secara parsial variabel independen tingkat pendidikan dan PDRB memiliki pengaruh negatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, pengangguran terbuka, dan PDRB secara bersama-sama memiliki pengaruh yang nyata terhadap tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan. Temuan ini mengisyaratkan bahwa upaya peningkatan kualitas pendidikan, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat merupakan langkah strategis dalam mengurangi tingkat kemiskinan di daerah pedesaan.

Kata kunci: Tingkat Pendidikan, Pengangguran Terbuka, PDRB, Kemiskinan Pedesaan, Analisis Data Panel.

---

How to cite: Supriaman, S. (2026). Dinamika Kemiskinan Pedesaan di Kalimantan Barat: Analisis Data Panel. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 6(1), 1-18. <https://doi.org/10.53088/jerps.v6i1.2080>

---



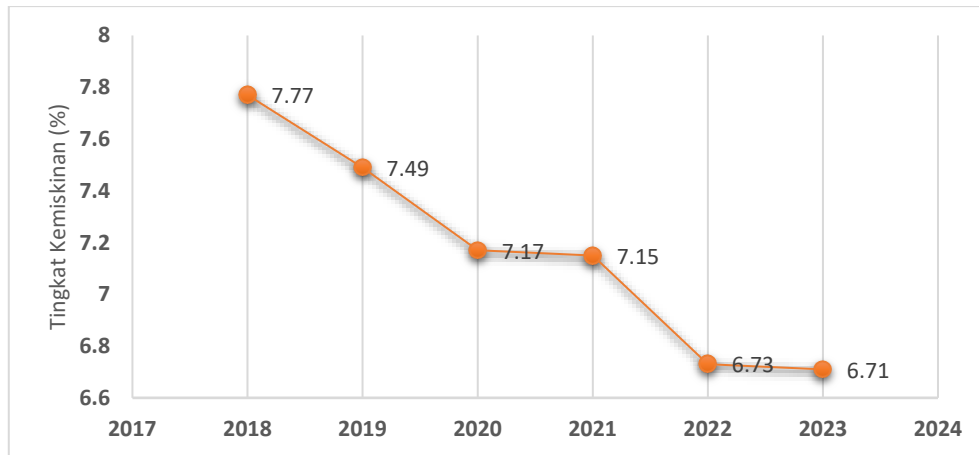
## 1. Pendahuluan

Salah satu permasalahan terbesar yang dihadapi masyarakat di Indonesia dan banyak wilayah lain di dunia adalah kemiskinan. Sekalipun tingkat kemiskinan secara keseluruhan di Indonesia telah menurun secara signifikan, masih terdapat perbedaan besar antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Dalam praktiknya, wilayah pedesaan kerap mencatat tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah metropolitan, sehingga agenda pengentasan kemiskinan tidak bisa dilepaskan dari konteks pembangunan pedesaan.

Kemiskinan adalah tema sentral dari kebijakan publik di sebagian besar negara berkembang, di mana sebagian besar populasi tinggal di daerah pedesaan (Huang 2022). Dibanyak negara, transformasi pedesaan (*rural transformation*) berperan sebagai kekuatan penggerak pengentasan kemiskinan pedesaan karena beroperasi melalui peningkatan bagian dari tanaman hasil tinggi dan diversifikasi mata pencaharian dengan meningkatkan bagian dari kegiatan non-pertanian (Haggblade et al. 2010;). Huang dan Shi (2021) menyarankan bahwa transformasi pedesaan yang lebih cepat berkontribusi pada penurunan kemiskinan pedesaan dibanyak negara berkembang. Adhikari et al. (2020) memberikan bukti empiris bahwa tingkat pendidikan dan pengurangan angka pengangguran terbuka memiliki dampak positif dan signifikan pada penurunan kemiskinan. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kebijakan publik dan teknik pengentasan kemiskinan melalui program *stimulant* pemerintah, inklusivitas gender, investasi dalam infrastruktur pedesaan, keterkaitan sektoral mundur dan maju, dan peluang mata pencaharian yang tersedia bagi penduduk pedesaan (Farooq & Younais 2018). Selain itu, pembangunan pedesaan melalui E-commerce dianggap sebagai saluran efisien untuk mengurangi kemiskinan pedesaan (Peng et al., 2021).

Di Indonesia, persoalan kemiskinan tetap menjadi prioritas kebijakan, termasuk di Provinsi Kalimantan Barat. Sebagai provinsi dengan proporsi wilayah pedesaan yang besar, Kalimantan Barat menghadapi tantangan yang serupa dalam hal kerentanan ekonomi rumah tangga serta keterbatasan akses terhadap layanan dasar. Karena itu, analisis dinamika kemiskinan di wilayah pedesaan Kalimantan Barat penting dilakukan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan sekaligus menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih efektif. Pemahaman visual juga diperlukan untuk menggambarkan dinamika kemiskinan yang kompleks di wilayah ini.

Berdasarkan Gambar 1, persentase kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat pada periode 2018–2023 menunjukkan kecenderungan menurun dari tahun ke tahun, dengan tingkat tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 7,77 persen. Namun demikian, pada periode 2018–2021, dinamika kemiskinan tidak dapat dilepaskan dari tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang memengaruhi berbagai sektor, sebagaimana juga terjadi di banyak daerah lain di Indonesia. Dalam konteks ini, penurunan kemiskinan cenderung sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah dan pemerintah dalam merespons guncangan ekonomi.



Gambar 1. Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat (2018-2023)

Sumber: BPS Kalimantan Barat, 2024.

Penurunan persentase kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat pada periode tersebut terutama dipengaruhi oleh respons kebijakan pemerintah dalam meredam dampak ekonomi pandemi COVID-19. Berbagai instrumen seperti stimulus ekonomi, bantuan sosial, dan program perlindungan sosial membantu menjaga daya beli rumah tangga serta menopang kelompok rentan, sehingga berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan (Ayuningtyas et al., 2023)

Ilustrasi pergerakan kemiskinan di atas menegaskan bahwa kemiskinan dapat berubah dengan cepat, sehingga banyak individu atau rumah tangga berpotensi masuk dan keluar dari kemiskinan dalam waktu relatif singkat. Hal ini terjadi karena kemiskinan merupakan fenomena yang dinamis, rumah tangga non-miskin dapat jatuh ke dalam kemiskinan dari satu periode ke periode berikutnya akibat guncangan negatif seperti sakit, krisis ekonomi, atau kegagalan panen. Begitu pula, rumah tangga miskin dapat keluar dari kemiskinan setelah mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, mendapat promosi, atau mendapatkan manfaat dari infrastruktur yang ditingkatkan (Dartanto & Nurkholis, 2013; Moeis et al., 2020). Dalam kerangka ini, dinamika kemiskinan umumnya dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu kemiskinan kronis dan kemiskinan sementara. Yang pertama adalah kemiskinan jangka panjang, menandakan bahwa rumah tangga terjebak di bawah batas kemiskinan untuk periode yang relatif lama. Yang kedua adalah kemiskinan sementara atau sementara, yang berarti bahwa rumah tangga dapat masuk dan keluar dari kemiskinan.

Meskipun topik kemiskinan telah menjadi fokus berbagai penelitian sebelumnya, sebagian besar studi cenderung menyoroti persoalan kemiskinan secara agregat atau perkotaan, tanpa membedakan karakteristik wilayah pedesaan yang memiliki kompleksitas tersendiri. Penelitian-penelitian sebelumnya di Provinsi Kalimantan Barat dalam kurun waktu 2018–2023 umumnya masih bersifat makro, dengan pendekatan kuantitatif umum yang kurang mendalami faktor-faktor struktural dan sosial yang secara khas mempengaruhi dinamika kemiskinan di pedesaan. Wilayah pedesaan di Kalimantan Barat memiliki tantangan spesifik seperti akses pendidikan yang terbatas, keterbatasan lapangan pekerjaan non-pertanian, rendahnya keterhubungan infrastruktur, dan kesenjangan pendapatan antar wilayah. Kompleksitas ini sering luput

dalam kajian yang menggeneralisasi kondisi seluruh provinsi. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan gambaran yang lebih akurat dan mendalam mengenai pengaruh variabel pendidikan, pengangguran terbuka, dan pendapatan per kapita terhadap kemiskinan secara khusus di wilayah pedesaan.

Selain itu, urgensi penelitian ini juga terletak pada kontribusinya dalam mendukung arah kebijakan yang lebih kontekstual dan berbasis wilayah. Dengan memahami karakteristik kemiskinan secara spasial dan faktor determinannya, penelitian ini dapat membantu perumusan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan responsif terhadap kondisi riil masyarakat pedesaan Kalimantan Barat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi kekosongan dalam literatur lokal tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih terarah.

## 2. Tinjauan Pustaka

### *Cycle of poverty theory*

Siklus kemiskinan sering dimulai dengan kondisi awal kemiskinan di mana individu atau keluarga mengalami keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, seperti pendapatan rendah. Akses terbatas terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta kurangnya peluang ekonomi, Kemiskinan cenderung terkait erat dengan faktor-faktor sosial dan ekonomi lainnya, seperti rendahnya tingkat pendidikan, tingginya tingkat pengangguran, keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar, serta ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya. Melalui proses transmisi, kondisi kemiskinan dapat diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Misalnya, anak-anak dari keluarga miskin mungkin mengalami keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas karena keterbatasan ekonomi keluarga mereka. Hal ini kemudian dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di masa depan (Myrdal, 1974).

### **Pendidikan dan Kemiskinan**

Becker (1993) menjelaskan bahwa pendidikan memiliki peranan yang penting dalam pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Becker mengemukakan bahwa seseorang dengan mengenyam pendidikan yang tinggi (lama sekolah) akan mendapatkan upah yang lebih layak dan dapat menghindarkannya dari kemiskinan. Hal ini didukung lebih lanjut oleh Kholiq dan Desmawan et al. (2022) yang dalam penelitiannya menunjukkan bahwa sumber daya manusia (yang diinterpretasikan melalui Human Capital Index) berpengaruh signifikan dalam mengurangi kemiskinan. Peningkatan modal manusia dalam pendidikan dan kesehatan akan menunjang produktifitas seseorang yang dapat mengeluarkannya dari jerat kemiskinan.

Pendidikan telah dipandang sejak lama sebagai jalan untuk keluar dari kemiskinan, baik di Amerika maupun di seluruh dunia (Ustama, 2009). Pentingnya pendidikan dalam pembangunan suatu negara, mendorong pemerintah untuk memberikan layanan gratis pada sekolah dasar dan menengah. Selain itu, pendidikan pada tingkat selanjutnya banyak disubsidi kepada para siswa maupun institusi. Perspektif lain menunjukkan bahwa pendidikan sebenarnya berperan dalam membuka kesempatan

yang lebih lebar untuk masyarakat. Kebijakan makro-ekonomilah yang dapat mengeluarkan seseorang dari kemiskinan. Peningkatan upah minimum, penyerapan tenaga kerja yang penuh, dan pemberantasan kelaparan serta kebijakan-kebijakan makro lainnya adalah isu penting dalam pengentasan kemiskinan.

Pendidikan masih menjadi faktor utama yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di banyak daerah, termasuk di pedesaan. Pertama-tama, rendahnya tingkat pendidikan sering kali menjadi hambatan utama bagi individu untuk meningkatkan mobilitas sosial dan ekonomi mereka. Dibanyak wilayah pedesaan, akses terhadap pendidikan yang berkualitas masih terbatas. Kurangnya sekolah, guru yang berkualitas, dan fasilitas pendidikan yang memadai membuat banyak anak-anak di pedesaan kesulitan untuk memperoleh pendidikan yang layak. Akibatnya, mereka mungkin hanya mampu mencapai tingkat pendidikan rendah atau bahkan putus sekolah secara prematur, yang kemudian membatasi peluang kerja mereka di masa depan (Rahayu et al., 2020).

Pendidikan juga dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan. Asumsi dasar dari teori modal manusia adalah bahwa seseorang dapat meningkatkan pendapatannya melalui peningkatan pendidikan. Setiap tambahan satu tahun sekolah berarti, di satu sisi, meningkatkan kemampuan kerja dan tingkat pendapatan seseorang. Pendidikan merupakan investasi untuk pembentukan modal manusia yang berkualitas. Menurut Sachs (2006), salah satu mekanisme dalam pengurangan kemiskinan adalah pengembangan modal manusia, terutama pendidikan dan kesehatan (Juliansyah, et al., 2024). Semakin tinggi rata-rata lama sekolah, semakin baik tingkat pendidikannya. Tingkat pendidikan penting dalam distribusi pendapatan dan kemiskinan. Hal ini sesuai dengan de janvry et al. (2006), yang menyatakan bahwa pendidikan mengurangi ketidaksetaraan dan kemiskinan secara langsung, yaitu: dengan meningkatkan produktivitas bagi kaum miskin, meningkatkan kesempatan mereka untuk mendapatkan pekerjaan dengan upah lebih baik, dan membuka jalur hubungan vertikal untuk anak-anak mereka. Secara tidak langsung, pendidikan memberikan lebih banyak kemampuan bagi kaum miskin untuk mendapatkan bagian dari total pendapatan.

Menurut Mukhtar et al. (2019) mengemukakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang salah satunya ditunjukkan dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, berperangaruh negrtih terhadap kemiskinan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan IPM yang dilakukan oleh pemerintah dapat mengurangi kemiskinan secara efektif. Dores dan Jolianis (2014), dalam penelitiannya, mengemukakan bahwa angka melek huruf berpengaruh negatif terhadap dan signifikan terhadap perubahan jumlah penduduk miskin. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan yang ditunjukkan melalui persentase angka melek huruf, maka jumlah penduduk miskin akan berkurang. Sebaliknya, apabila pendidikan tidak dijalankan dan terjadi peningkatan angka buta huruf atau penurunan angka melek huruf, maka jumlah penduduk miskin akan bertambah.

Hasil yang sama dikemukakan oleh Amalia (2017), melalui penelitiannya, yaitu terdapat pengaruh signifikan variabel Angka Melek Huruf terhadap tingkat kemiskinan.

Penelitiannya menunjukkan bahwa setiap peningkatan pendidikan yang ditunjukkan dengan peningkatan Angka Melek Huruf akan mengurangi tingkat kemiskinan. Begitu pula sebaliknya, penurunan pendidikan yang ditunjukkan dengan penurunan Angka Melek Huruf akan meningkatkan tingkat kemiskinan dengan asumsi variabel lain tetap. Analisis logistik menunjukkan bahwa peningkatan pendidikan kepala rumah tangga berdampak pada kemungkinan bahwa rumah tangga tersebut menjadi tidak miskin (Majumder & Biswas, 2017). Dalam penelitian yang sama, jumlah anggota keluarga yang bisa membawa (tingkat melek huruf anggota keluarga) akan mengurangi kemungkinan rumah tangga menjadi miskin. Sehingga, masyarakat harus didorong untuk menyekolahkan anaknya di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya. Pembuat kebijakan juga dituntut agar dapat menjamin ketersediaan pendidikan bagi semua.

Hasil penelitian yang berbeda dikemukakan oleh Anggadini (2015) yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang ditunjukkan dengan angka melek huruf, berkorelasi positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan membaca saja tidak cukup untuk menghindarkan seseorang dari kemiskinan. Seseorang dengan yang terhindar dari buta huruf, jika tidak diikuti dengan keterampilan dan kemampuan yang memadai, tidak akan memiliki produktivitas yang baik. Produktivitas yang baik akan mendorong seseorang untuk memperoleh kesejahteraan yang lebih baik dan mengeluarkannya dari jerat kemiskinan. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Angka Melek Huruf yang tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan (Muhtarom, 2016).

Menurut Hadi (2019), mengemukakan dalam penelitiannya bahwa Rata-rata Lama Sekolah berpengaruh negatif/berbanding terbalik terhadap persentase penduduk miskin. Seseorang yang mengenyam pendidikan lebih lama akan menjauhkan mereka dari garis kemiskinan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Mankiw (2012), setiap tahun yang digunakan seseorang untuk bersekolah (peningkatan Lama Sekolah) akan meningkatkan upah yang diterimanya. Peningkatan upah ini akan mendorong tingkat kesejahteraan seseorang dan menjauhkannya dari jerat kemiskinan.

Hasil penelitian yang sama juga ditunjukkan oleh Faritz dan Soejoto (2020). Berdasarkan penelitiannya, Rata-rata Lama Sekolah berpengaruh signifikan negatif terhadap variabel kemiskinan. Faritz dan Soejoto (2020) mengungkapkan bahwa kajian yang mereka lakukan memberikan koefisien regresi yang sama dengan teori Human Capital, teori ini menyatakan bahwa investasi dalam pendidikan dapat meningkatkan kualitas produktivitas masyarakat. Jika kualitas pendidikan baik, maka kualitas masyarakatnya semakin baik. Sehingga, pendidikan dapat mengeluarkan masyarakat dari lingkaran kemiskinan.

Hasil berbeda ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Mandey et al. (2023). Hasil analisis menggunakan regresi menunjukkan pengaruh positif yang signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini berarti apabila rata-rata lama sekolah meningkat, maka akan terjadi peningkatan kemiskinan. Hal ini tentu saja tidak sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa pendidikan dapat berperan penting dalam mengurangi kemiskinan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Sari et al. (2023),

menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap kemiskinan. Perbedaan temuan ini menegaskan bahwa kemiskinan merupakan persoalan multidimensi: pendidikan tetap penting, tetapi dampaknya terhadap kemiskinan sangat bergantung pada konteks seperti kualitas pendidikan, kesempatan kerja, struktur ekonomi wilayah, dan dukungan kebijakan lainnya, sehingga pengentasan kemiskinan tidak dapat hanya bertumpu pada pendidikan semata

### **Pengangguran dan Kemiskinan**

Selain Pendidikan, pengangguran juga merupakan masalah serius yang berkontribusi terhadap kemiskinan di pedesaan. Banyak wilayah pedesaan menghadapi kurangnya kesempatan kerja yang layak dan berpenghasilan tinggi. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk rendahnya pertumbuhan ekonomi lokal, keterbatasan akses terhadap pasar kerja di luar sektor pertanian, dan kurangnya keterampilan atau kualifikasi yang dimiliki oleh penduduk pedesaan. Terutama, bagi mereka yang hanya memiliki pendidikan rendah, kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak seringkali sangat terbatas (Shi & Huang, 2023).

Salah satu hal yang dapat menghambat perkembangan perekonomian suatu bangsa adalah pengangguran. Hal ini terjadi ketika jumlah penduduk besar dan kesempatan kerja tidak mencukupi, yang dapat menurunkan produktivitas angkatan kerja (Agustin & Sumarsono, 2022). Jika jumlah pengangguran tinggi, berarti banyak masyarakat yang tidak memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhannya sehingga mengakibatkan harus mengurangi kebutuhan. Kemiskinan biasanya digambarkan sebagai rendahnya pendapatan yang dimiliki seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok. Ketidamampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhannya karena tidak memiliki pendapatan yang cukup akan mengakibatkan berada digaris kemiskinan (Fitriana et al., 2019).

Salah satu faktor yang menjadi penyebab jumlah penduduk miskin yaitu di tentukan dengan seberapa besar jumlah pengangguran yang ada di suatu wilayah tersebut. Pengangguran bisa disebabkan oleh bertambahnya angkatan kerja baru yang terjadi tiap tahunnya, sementara itu penyerapan tenaga kerja tidak bertambah. Dan masalah pengangguran bertambah serius yang disebabkan perkembangan penduduk yang kian bertambah cepat dan jumlah yang sangat besar. Menurut Aini dan Nugroho (2024), dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pengangguran memiliki hubungan yang positif terhadap kemiskinan, sedangkan menurut Zanzibar et. al (2024), tingkat pengangguran memiliki hubungan negatif dengan kemiskinan.

### **Pendapatan dan Kemiskinan**

Pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan ekonomi suatu wilayah (Harvie et al., 2009). Dalam ekonomi makro, pendapatan perkapita menggambarkan jumlah pendapatan rata-rata yang diperoleh oleh setiap individu dalam suatu wilayah tertentu selama satu periode waktu, misalnya dalam waktusatu tahun (Kavya & Shijin, 2020). Pengukuran ini memberikan gambaran tentang daya beli masyarakat serta kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar. Semakin tinggi pendapatan perkapita, diharapkan kesejahteraan

masyarakat meningkat (Fang, 2011), yang secara teori akan menurunkan angka kemiskinan (Ravallion, 2022). Namun, distribusi pendapatan yang tidak merata dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi, yang pada gilirannya mempengaruhi tingkat kemiskinan di suatu wilayah (Bourguignon, 2018).

Pendapatan per kapita mencerminkan pendapatan rata-rata penduduk suatu daerah. Pendapatan per kapita akan meningkat apabila produksi barang dan jasa meningkat. Peningkatan pendapatan per kapita erat kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan (Maryanti, et al., 2015). Tingkat pendapatan sangat menentukan kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan mendasar manusia dapat berupa makanan dan non makanan. Yudanto et al. (2020), menyatakan bahwa pendapatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap konsumsi rumah tangga makanan dan non makanan. Artinya, pendapatan memegang peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan mendasar. Pendapatan yang semakin tinggi akan meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga kebutuhan mendasar dapat terpenuhi. Jika kebutuhan mendasar telah terpenuhi, maka kesejahteraan meningkat dan kemiskinan akan menurun.

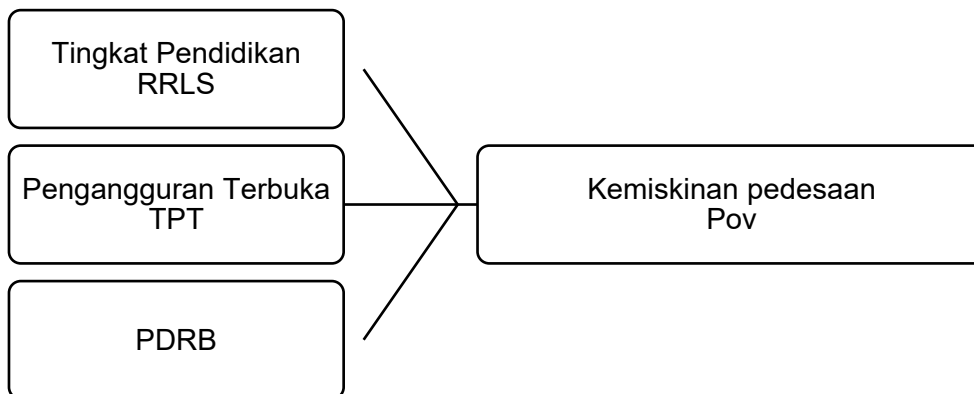
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Arianita dan Efendi (2024), menunjukkan bahwa pendapatan per kapita memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat kemiskinan. Peningkatan pendapatan per kapita secara konsisten berkorelasi dengan penurunan tingkat kemiskinan. Namun, hasil analisis juga menunjukkan bahwa distribusi pendapatan yang tidak merata dapat memperlambat pengurangan kemiskinan. Selain itu, jumlah penduduk turut mempengaruhi tingkat kemiskinan, di mana peningkatan jumlah penduduk berpotensi meningkatkan angka kemiskinan apabila tidak diimbangi dengan kebijakan ekonomi dan sosial yang memadai. Dalam hal ini, tergambar dengan jelas bahwa pendapatan per kapita berkorelasi negatif dengan kemiskinan. Beberapa penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa pendapatan per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan (Anggadini, 2015; Azizah et al., 2018; Sari, 2018; Wirawan & Arka, 2015).

### **3. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, yaitu merupakan pendekatan penelitian yang memakai paradigma positivisme untuk mengolah data sehingga menjadi bahan analisis statistik. Data yang dipakai dalam metode penelitian ini adalah sekumpulan angka untuk menghasilkan data, dan penggunaan data pun harus dianalisis melalui pendekatan statistik guna membuktikan atau menolak hipotesis yang telah ditentukan. Penelitian ini dilaksanakan pada 12 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat.

Penelitian ini menggunakan data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data ini mencakup 12 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Informasi yang dikumpulkan meliputi Tingkat persentase kemiskinan, pendidikan, pengangguran dan pendapatan perkapita. Studi ini menggunakan data panel selama enam periode, yaitu 2018 hingga 2023. Variabel yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah variabel

terikat (dependen) adalah Persentase Kemiskinan Pedesaan (Y) dan variabel bebas (independen) adalah Tingkat Pendidikan (X1), Pengangguran terbuka (X2), dan PDRB (X3).



Gambar 2. Kerangka Konseptual Penelitian

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Analisis data panel adalah suatu metode yang menjelaskan mengenai gabungan dari data *time-series* dengan *cross - section*

$$Pov_{it} = \beta_0 + \beta_1 RRLS_{it} + \beta_2 TPT_{it} + \beta_3 PDRB_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

- Pov : Tingkat Kemiskinan Pedesaan
- $\beta_0$  : Konstanta
- $\beta_1 \beta_2 \beta_3$  : Koefisien Regresi
- RRLS : Tingkat pendidikan
- TPT : Pengangguran terbuka
- PDRB : Produk Domestik Regional Bruto ADHK
- I : 12 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Bara
- t : Tahun 2018-2023
- e : *error term*

## 4. Hasil dan Pembahasan

### 4.1. Hasil Penelitian

Dalam analisis regresi data panel, terdapat tiga model utama yang dapat dipilih: *Pooled Least Square (Pooled OLS)*, *Fixed Effect Model (FEM)*, dan *Random Effect Model (REM)*. Uji pemilihan model diperlukan untuk menentukan model mana yang paling sesuai untuk data yang digunakan.

#### Uji Pemilihan Model

Tabel 1. Uji Chow

<i>Effects Test</i>	<i>Statistic</i>	<i>d.f.</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section F</i>	276,133809	(11, 57)	0,0000
<i>Cross-section Chi-square</i>	287,591132	11	0,0000

Tabel 2. Uji Hausman

<i>Test Summary</i>	<i>Chi-Sq. Statistic</i>	<i>Chi-Sq. d.f.</i>	<i>Prob.</i>
Cross-section random	1.914342	3	0.5904

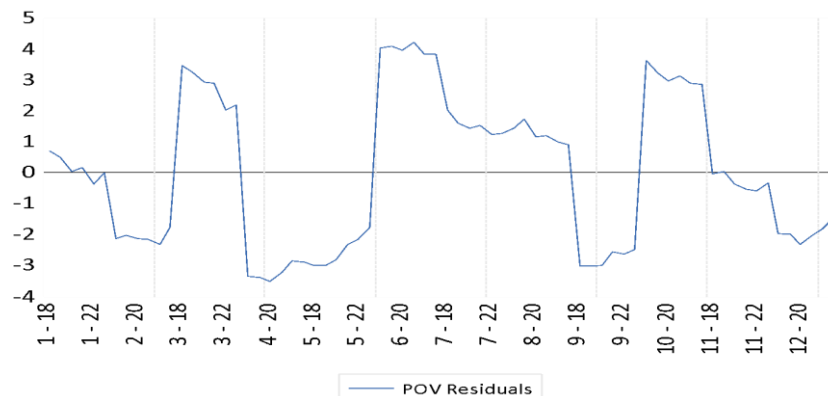
Nilai Prob. 0,37 > 0,05, maka yang terpilih model REM.

Tabel 3. Uji LM

Metode Uji	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	156,6271 (0,0000)	1,808301 (0,1787)	158,4354 (0,0000)
Honda	12,51508 (0,0000)	-1,344731 (0,9106)	7,898627 (0,0000)
King-Wu	12,51508 (0,0000)	-1,344731 (0,9106)	5,881148 (0,0000)
Standardized Honda	15,01652 (0,0000)	-1,145397 (0,8740)	6,291248 (0,0000)
Standardized King-Wu	15,01652 (0,0000)	-1,145397 (0,8740)	4,045932 (0,0000)
Gourieroux et al.	--	--	156,6271 (0,0000)

Nilai Prob.  $0,00 < 0,05$ , maka yang terpilih model REM. Model REM dipilih berdasarkan temuan uji LM, uji Hausman, dan uji Chow.

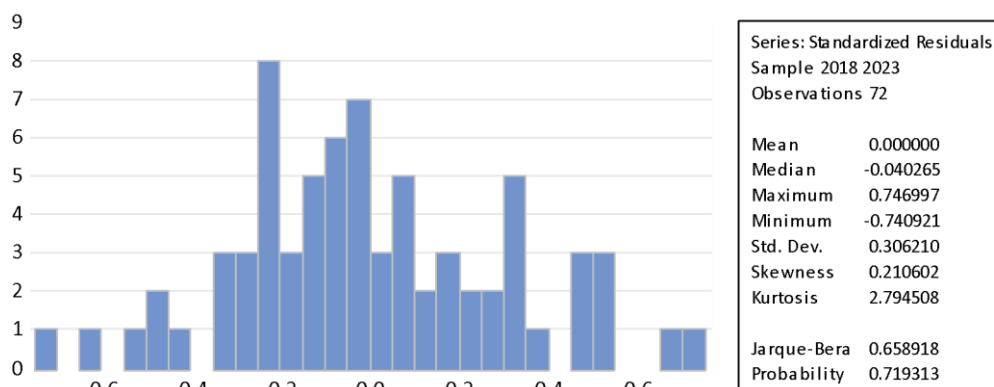
### Uji Asumsi Klasik



Gambar 3. Hasil Uji Heterokedastisitas

Gambar 3. menunjukkan bahwa varians residu tetap konstan karena residu (biru) tidak melewati batas 500 dan -500. Akibatnya, tidak ada gejala heteroskedastisitas maupun lolos uji heteroskedastisitas.

### Uji Normalitas



Gambar 4. Hasil Uji Normalitas

Terlihat jelas dari Gambar 4. nilai probabilitasnya adalah  $0,71 > 0,05$ . Dengan demikian, data dijamin lolos uji normalitas atau terdistribusi normal.

### Uji Multikolinearitas

Koefisien korelasi variabel Tingkat Pendidikan (RRLS) dan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar (TPT)  $0,63 < 0,85$  dan RRLS dan PDRB  $0,37 < 0,85$ . TPT dan PDRB sebesar  $0,51 < 0,85$ . Maka dapat disimpulkan bahwa terbebas dari multikolinearitas/ lolos uji multikolinearitas.

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

	RRLS	TPT	PDRB
RRLS	1,000	0,063	0,380
TPT	0,063	1,000	0,517
PDRB	0,380	0,517	1,000

Adapun hasil estimasi dengan menggunakan random effect sebagaimana Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Estimasi *Random Effect Model*.

Variabel	Koefisien	t-Statistik	Probabilitas	Interpretasi
RRLS	-1,004	-3,941	0,000	Signifikan.
TPT	-0,004	-0,08	0,936	Tidak signifikan
PDRB	-9,451	-3,65	0,000	Signifikan s
R-squared	0,55			
Prob (F-Statistic)	0,00			

Berdasarkan Tabel 5 maka dapat dijelaskan bahwa

- 1 Signifikan secara statistik pada level 5% ( $p < 0,05$ ). Setiap peningkatan 1 persen pada RRLS akan menurunkan tingkat kemiskinan (variabel dependen, tidak disebutkan) sebesar 1,004 persen, dengan asumsi variabel lain tetap.
- 2 Tidak signifikan ( $p > 0,05$ ). Artinya, perubahan TPT tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan dalam model ini.
- 3 Signifikan secara statistik pada level 5%. Setiap peningkatan 1 persen pada PDRB akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 9,451 persen, dengan asumsi variabel lain tetap.

#### Goodness of Fit (Kesesuaian Model)

R-squared = 0,55, Ini berarti sekitar 55% variasi dalam variabel dependen dapat dijelaskan oleh model (oleh RRLS, TPT, dan PDRB). Sisanya 45% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Nilai ini tergolong sedang, dan cukup baik dalam konteks ilmu sosial. Probabilitas F-statistic = 0,00, Ini berarti model secara keseluruhan signifikan secara statistik pada level 1%. Artinya, minimal satu variabel independen dalam model ini secara signifikan menjelaskan variasi variabel dependen.

#### 4.2. Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tingkat pendidikan (RRLS) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara signifikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan pedesaan di Kalimantan Barat, sedangkan variabel tingkat pengangguran terbuka (TPT) tidak berpengaruh secara statistik. Secara simultan, ketiga variabel independen memberikan kontribusi sebesar 55% terhadap variasi tingkat kemiskinan pedesaan di Kalimantan Barat, yang menunjukkan bahwa model memiliki tingkat kesesuaian yang moderat dan cukup dapat diandalkan untuk menjelaskan fenomena yang diteliti.

Faktor-faktor sosial-ekonomi seperti pendidikan dan pertumbuhan ekonomi lokal memainkan peran kunci dalam penurunan kemiskinan pedesaan. Dalam konteks

Kalimantan Barat, rata-rata lama sekolah (RRLS) menjadi variabel penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Studi oleh Surbakti et al (2023), menegaskan bahwa peningkatan lama pendidikan memberikan kontribusi signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja dan mobilitas sosial vertikal.

Koefisien negatif signifikan pada variabel RRLS menunjukkan bahwa semakin tinggi rata-rata lama sekolah, maka tingkat kemiskinan cenderung menurun. Hal ini sejalan dengan teori siklus kemiskinan dan teori modal manusia yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu sarana paling efektif untuk meningkatkan mobilitas ekonomi, meningkatkan produktivitas, serta membuka peluang kerja yang lebih baik. Temuan ini konsisten dengan hasil studi sebelumnya oleh Rahman (2025), yang menekankan bahwa pendidikan berperan penting dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan.

Salah satu alasan utama mengapa pendidikan berdampak signifikan adalah karena di daerah pedesaan, masyarakat cenderung menggantungkan hidup pada pekerjaan sektor informal atau pertanian subsisten. Pendidikan yang memadai dapat membuka akses terhadap lapangan kerja formal dan non-pertanian yang lebih produktif (World Bank, 2018). Peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai alat mobilitas sosial, tetapi juga menekan tingkat pengangguran terselubung di pedesaan.

Variabel PDRB juga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan pedesaan di Kalimantan Barat, yang menunjukkan bahwa peningkatan nilai ekonomi wilayah turut menurunkan tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan di Kalimantan Barat. Peningkatan PDRB per kapita mengindikasikan adanya pertumbuhan ekonomi yang dapat membuka lebih banyak lapangan kerja dan memperbaiki taraf hidup masyarakat pedesaan. Temuan ini mendukung studi dari Farooq dan Younais (2018), serta Shi & Huang (2023) yang menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi inklusif bagi penurunan kemiskinan di wilayah pedesaan.

Sementara itu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga menunjukkan hubungan negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di daerah berkontribusi langsung terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Ketika PDRB meningkat, pendapatan per kapita naik dan daya beli masyarakat membaik. Dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan serta memperkuat infrastruktur ekonomi lokal (Barro, 1991).

Namun demikian, penting dicatat bahwa kualitas pertumbuhan ekonomi juga perlu diperhatikan. Jika pertumbuhan tidak inklusif dan hanya dinikmati oleh sebagian kecil penduduk, maka efek pengurangannya terhadap kemiskinan menjadi terbatas (Todaro & Smith, 2015). Oleh karena itu, kebijakan pembangunan di Kalimantan Barat sebaiknya diarahkan untuk mengurangi ketimpangan, khususnya antara kawasan perkotaan dan pedesaan.

Variabel tingkat pengangguran terbuka (TPT), meskipun secara teori berkorelasi positif terhadap kemiskinan, tidak menunjukkan hubungan signifikan dalam studi ini.

Hal ini dapat dijelaskan melalui karakteristik struktur tenaga kerja di wilayah pedesaan Kalimantan Barat. Sebagian besar masyarakat bekerja di sektor informal, seperti buruh tani, nelayan kecil, atau pedagang kaki lima, yang tidak tercatat dalam statistik pengangguran terbuka (BPS, 2024). Oleh karena itu, data TPT tidak mencerminkan kondisi ekonomi riil masyarakat pedesaan.

Studi oleh Harris dan Todaro (1970), menjelaskan bahwa dalam masyarakat agraris, pilihan pekerjaan tidak sepenuhnya rasional berdasarkan upah, tetapi lebih pada stabilitas dan akses terhadap sumber daya. Ini menjelaskan mengapa pengangguran terbuka rendah, namun kemiskinan tetap tinggi. Selain itu, struktur sosial-budaya lokal juga mempengaruhi keputusan tenaga kerja, di mana pekerjaan informal dianggap cukup untuk bertahan hidup meskipun berada di bawah garis kemiskinan (Ellis, 2000).

Sebagai implikasi kebijakan, pemerintah daerah perlu merancang intervensi berbasis komunitas untuk mengembangkan keterampilan masyarakat pedesaan melalui pelatihan kerja dan pendidikan vokasional. Selain itu, penting untuk memperkuat akses terhadap modal usaha mikro dan membangun pasar lokal yang dapat menyerap hasil produksi pedesaan secara berkelanjutan (Chambers, 1983).

Keseluruhan temuan ini memperkuat argumentasi bahwa pendekatan multisektoral sangat diperlukan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pendidikan, pertumbuhan ekonomi yang merata, dan penciptaan pekerjaan informal yang produktif merupakan pilar utama kebijakan pembangunan pedesaan di Kalimantan Barat.

## 5. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan Provinsi Kalimantan Barat selama periode 2018–2023. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, tingkat pengangguran terbuka, dan pendapatan per kapita merupakan faktor yang memiliki peran penting dalam menjelaskan dinamika kemiskinan di wilayah tersebut. Secara umum, rendahnya tingkat pendidikan dan tingginya pengangguran di wilayah pedesaan menjadi hambatan utama dalam upaya pengentasan kemiskinan. Sebaliknya, peningkatan pendapatan per kapita terbukti berkontribusi terhadap perbaikan kondisi ekonomi masyarakat pedesaan.

Temuan ini memberikan implikasi bahwa kebijakan pengurangan kemiskinan di wilayah pedesaan Kalimantan Barat perlu diarahkan pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan, penciptaan lapangan kerja yang produktif, serta penguatan kegiatan ekonomi lokal yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait diharapkan dapat merancang program pembangunan yang lebih berfokus pada karakteristik dan kebutuhan masyarakat pedesaan secara berkelanjutan.

## Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, khususnya Program Studi Ekonomi Islam, atas

dukungan akademik dan fasilitas yang diberikan selama proses penelitian hingga penyusunan artikel ini. Penghargaan yang tulus juga penulis sampaikan kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat dan BPS Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat atas ketersediaan data statistik yang akurat dan relevan, yang menjadi sumber utama dalam analisis penelitian ini. Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada rekan-rekan sejawat di lingkungan FEB UNTAN, yang telah memberikan masukan, diskusi akademik, dan motivasi selama proses penulisan berlangsung.

## Referensi

- Adhikari, S. P., Meng, S., Wu, Y. J., Mao, Y. P., Ye, R. X., Wang, Q. Z., & Zhou, H. (2020). Epidemiology, causes, clinical manifestation and diagnosis, prevention and control of coronavirus disease (COVID-19) during the early outbreak period: a scoping review. *Infectious diseases of poverty*, 9(1), 29. <https://doi.org/10.1186/s40249-020-00646>
- Agustin, L., & Sumarsono, H. (2022). Pengaruh pengangguran, IPM, dan bantuan sosial terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ekonika: Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 7(2), 263-286.
- Aini, S. N., & Nugroho, R. Y. Y. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Pengangguran, dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. *Buletin Ekonomika Pembangunan*, 4(1). <https://doi.org/10.21107/bep.v4i1.19474>
- Amalia, A. (2017). Pengaruh pendidikan, pengangguran dan Ketimpangan gender terhadap kemiskinan di Sumatera utara. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2), 324-344. <http://dx.doi.org/10.30821/ajei.v2i2.1225>
- Anggadini, F. (2015). Analisis Pengaruh Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Pendapatan Domestik Regional Bruto Perkapita Terhadap Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010-2013. *E-Jurnal Katalogis*, 3(7), 40-49.
- Arlianta, Y. Y., & Effendi, A. S. (2024). Pengaruh Jumlah Penduduk, Investasi, Belanja Pemerintah dan Transfer Dana Desa terhadap Tingkat Kemiskinan melalui Variabel Moderasi Pendapatan Perkapita di Kabupaten Panajam Paser Utara. *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Manajemen*, 20(2), 455-470. <https://doi.org/10.30872/jinv.v20i2.1794>
- Ayuningtyas, D. K., Auliannisa, K., & Martha, S. (2023). Analysis of factors affecting the percentage of poverty in West Kalimantan with panel data regression. *Forum Analisis Statistik (FORMASI)*, 3(1), 34-41. <https://doi.org/10.57059/formasi.v3i1.43>
- Ayuningtyas, D. K., Auliannisa, K., & Martha, S. (2023, July). Analysis Of Factors Affecting The Percentage Of Poverty In West Kalimantan With Panel Data Regression. In *Jurnal Forum Analisis Statistik (FORMASI)* (Vol. 3, No. 1, pp. 34-41). <https://doi.org/10.57059/formasi.v3i1.43>
- Azizah, E. W., Sudarti, S., & Kusuma, H. (2018). Pengaruh pendidikan, pendapatan perkapita dan jumlah penduduk terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 2(1), 167-180. <https://doi.org/10.22219/jie.v2i1.6976>
- Barro, R. J. (1991). Economic growth in a cross section of countries. *The quarterly journal of economics*, 106(2), 407-443. <https://doi.org/10.2307/2937943>

- Becker, G. S. (1989). *Human capital: a theoretical and empirical analysis, with special reference to education*. Chicago: University of Chicago Press.
- Bourguignon, F. (2018). Simple adjustments of observed distributions for missing income and missing people. *The Journal of Economic Inequality*, 16(2), 171-188. <https://doi.org/10.1007/s10888-018-9388-8>
- Chambers, R. (1983). *Rural Development: Putting the Last First*. Longman.
- Dartanto, T., & Nurkholis. (2013). The dynamics of poverty in Indonesia. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 28(2), 123-142. <https://doi.org/10.1080/00074918.2013.772939>
- de Janvry, A., Finan, F., Sadoulet, E. J., & Vakis, R. (2006). Can conditional cash transfer programs serve as safety nets in keeping children at school and from working when exposed to shocks? *Journal of Development Economics*, 79(2), 349-373. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2006.01.013>
- Dores, E. & Jolianis, (2014). Pengaruh angka melek huruf dan angka harapan hidup terhadap jumlah penduduk miskin di propinsi sumatera barat. *Economica: Journal of Economic and Economic Education*, 2(2), 126-133. <https://doi.org/10.22202/economica.2014.v2.i2.225>
- Ellis, F. (2000). *Rural livelihoods and diversity in developing countries*. Oxford university press.
- Fang, Y. (2011). Economic welfare impacts from renewable energy consumption: The China experience. *Renewable and sustainable energy Reviews*, 15(9), 5120-5128. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2011.07.044>
- Faritz, M. N., & Soejoto, A. (2020). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan rata-rata lama sekolah terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 8(1), 15-21. <https://doi.org/10.26740/jupe.v8n1.p15-21>
- Farooq, S., & Ahmad, U. (2020). Economic Growth and Rural Poverty in Pakistan: A Panel Dataset Analysis: S. Farooq, U. Ahmad. *The European Journal of Development Research*, 32(4), 1128-1150. <https://doi.org/10.1057/s41287-020-00259-y>
- Farooq, S., & Farah, N. A. Z. (2023). Developing strategy for rural transformation to alleviate poverty in Pakistan: Stylized facts from panel analysis. *Journal of Integrative Agriculture*, 22(12), 3610-3623. <https://doi.org/10.1016/j.jia.2023.11.028>
- Hadi, A. (2019). Pengaruh rata-rata lama sekolah kabupaten/kota terhadap persentase penduduk miskin kabupaten/kota di provinsi jawa timur tahun 2017. *Media trend*, 14(2), 148-153. <https://doi.org/10.21107/mediatrend.v14i2.4504>
- Haggblade, S., Hazell, P., & Reardon, T. (2010). The rural non-farm economy: Prospects for growth and poverty reduction. *World development*, 38(10), 1429-1441. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2009.06.008>
- Harris, J. R., & Todaro, M. P. (1970). Migration, unemployment and development: a two-sector analysis. *The American economic review*, 60(1), 126-142.
- Harvie, D., Slater, G., Philp, B., & Wheatley, D. (2009). Economic well-being and British regions: the problem with GDP per capita. *Review of Social Economy*, 67(4), 483-505. <https://doi.org/10.1080/00346760802245383>

- Huang, J. J., Shi, H. R., Li, S. H., Liu, S., Huang, P. W., Zhang, H. F., Guo, A.W., & Zhou, L. B. (2021). Study on the characteristics and ecological control techniques of leech (*Zeylanicobdella arugamensis*) parasitic on grouper. *Journal Of Yunnan Agricultural University (Natural Scien)* 36(3): 456-464. [https://doi.org/10.12101/j.issn.1004-390X\(n\).202005043](https://doi.org/10.12101/j.issn.1004-390X(n).202005043)
- Huang, J. K. (2023). Rural transformation, income growth, and poverty reduction by region in China in the past four decades. *Journal of Integrative Agriculture*, 22(12), 3582-3595. <https://doi.org/10.1016/j.jia.2023.10.037>
- Juliansyah, J., Khoffifah, K., Khoiriyah, K., & Daryono, D. (2024). Pengembangan sumber daya manusia dalam pengentasan kemiskinan di Kalimantan Timur. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(7), 2642-2654. <https://dx.doi.org/10.46799/jsa.v5i7.1271>
- Junoh, M. Z. B. H., Hidthiir, M. M. H. B., & Basheer, M. F. (2019). Entrepreneurial financial practices in Pakistan: The role of access to finance and financial literacy. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 7(9), 210-231.
- Kavya, T. B., & Shijin, S. (2020). Economic development, financial development, and income inequality nexus. *Borsa Istanbul Review*, 20(1), 80-93. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2019.12.002>
- Kholiq, F., & Desmawan, D. (2022). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan (Studi Kasus Pada Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)*, 2(2), 537-546.
- Lehtonen, O., Hiltunen, A. P., Okkonen, L., & Blomqvist, K. (2024). Emerging spatial clusters of energy poverty vulnerability in rural Finland—Byproducts of accumulated regional development. *Energy Research & Social Science*, 109, 103418. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2024.103418>
- Li, X., Peng, X., & Peng, Y. (2023). Unravelling the influence and mechanism of agricultural inputs on rural poverty vulnerability: Evidence from China. *Heliyon*, 9(12). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e22851>
- Majumder, S., & Biswas, S. C. (2017). The role of education in poverty alleviation: Evidence from Bangladesh. *Journal of Economics and Sustainable Development*, 8(20), 151-160.
- Mandey, D. R., Engka, D. S., & Siwu, H. F. D. (2023). Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Rata-rata Lama Sekolah, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(1), 37-48.
- Maryanti, E. P., Soleh, A., & Haris, A. (2025). Pengaruh Pendidikan, Kesehatan, Dan Pendapatan Perkapita Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jambi. *Edu Sosial*, 5(1), 27-35. <https://doi.org/10.22437/jeso.v5i1.48715>
- Moeis, F. R., Dartanto, T., Moeis, J. P., & Ikhsan, M. (2020). A longitudinal study of agriculture households in Indonesia: The effect of land and labor mobility on welfare and poverty dynamics. *World Development Perspectives*, 20, 100261. <https://doi.org/10.1016/j.wdp.2020.100261>
- Muhtarom, A. (2016). Pengaruh Angka Melek Huruf Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur Periode 2008-2015. *Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen*, 1(3), 154-165.

- Mukhtar, S., Saptono, A. & Arifin, A. S. (2019). Analisis pengaruh indeks pembangunan manusia dan tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan di Indonesia. *Ecoplan*, 2(2), 77-89. <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v2i2.20>
- Myrdal, G. (2017). *The political element in the development of economic theory*. Routledge.
- Peng, C., Ma, B., & Zhang, C. (2021). Poverty alleviation through e-commerce: Village involvement and demonstration policies in rural China. *Journal of Integrative Agriculture*, 20(4), 998–1011. [https://doi.org/10.1016/S2095-3119\(20\)63422-0](https://doi.org/10.1016/S2095-3119(20)63422-0)
- Rahayu, H. C., Sarungu, J. J., Hakim, L., Susilo, A. M., Lestari, E. P., Astuti, D., & Retnaningsih, T. K. (2020). Poverty dynamics in Indonesia: Empirical evidence from dynamic panel data analysis. *Indonesian Journal of Development Planning*, 4(1), 77–92. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200522.028>
- Rahman, A. (2025). Strategi Pengurangan Ketimpangan Pendapatan di Jawa Barat Melalui Peningkatan Pendidikan dan Pengurangan Kemiskinan. *Journal of Business, Finance, and Economics (JBFE)*, 6(1), 65-74. <https://dx.doi.org/10.32585/jbfe.v6i1.6572>
- Ravallion, M. (2022). Missing top income recipients. *The Journal of Economic Inequality*, 20(1), 205-222. <https://doi.org/10.1007/s10888-022-09530-0>
- Sachs, J. D. (2006). *The end of poverty: Economic possibilities for our time*. Penguin.
- Sari, N. (2018). Determinan Tingkat Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007-2014. *Economics Development Analysis Journal*, 7(2), 128-136. <https://doi.org/10.15294/edaj.v8i2.23411>
- Sari, P. D., Najla, S. & Desmawan, D. (2023). Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka dan Rata-rata Lama Sekolah Terhadap Tingkat Penduduk Miskin di Indonesia 2020. *Wawasan: Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan* pp. 20-30.
- Scalioni Brito, A., & Lessa Kerstenetzky, C. (2019). Has the minimum wage policy been important for reducing poverty in Brazil? Decomposition analysis for the period from 2002 to 2013. *Economia*, 20(1), 27–43. <https://doi.org/10.1016/j.econ.2019.02.002>.
- Shi, P. fei, & Huang, J. kun. (2023). Rural transformation, income growth, and poverty reduction by region in China in the past four decades. *Journal of Integrative Agriculture*, 22(12), 3582–3595. <https://doi.org/10.1016/j.jia.2023.10.037>
- Shi, Y., & Huang, J. (2023). Structural transformation and rural development: Evidence from China. *World Development*, 161, 106027.
- Surbakti, S. P. P., Muchtar, M., & Sihombing, P. R. (2023). Analisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di Indonesia periode 2015-2021. *Ecoplan*, 6(1), 37-45. <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v6i1.631>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development* (12th ed.). Pearson.
- Ustama, D. D. (2009). Peranan pendidikan dalam pengentasan kemiskinan. *Dialogue*, 6(1), 1-12.
- Wirawan, I. M. T., & Arka, S. (2015). Analisis pengaruh pendidikan, PDRB per kapita, dan tingkat pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4(5), 44542.

- World Bank. (2018). World Development Report 2018: Learning to Realize Education's Promise. *World Bank Publications*.
- Yudanto, D., Rochaida, E., & Priyagus, P. (2020). Pengaruh pendapatan perkapita dan inflasi serta suku bunga terhadap konsumsi rumah tangga makanan dan non makanan serta pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. *Kinerja*, 17(2), 287–297. <https://doi.org/10.30872/jkin.v17i2.7955>
- Zanzibar, D., Rahmadhania, F., Kiswanda, R., & Rohmi, M. L. (2024). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Jawa Timur. *Jurnal Economina*, 3(4), 562-574. <https://doi.org/10.55681/economina.v3i4.1296>